

---

**Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus di Kota Surakarta)**

**Wikan Budi Utami, Rizal Ramadhan, Sinta Azzahroh**

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Email: [budiutamiwikan@gmail.com](mailto:budiutamiwikan@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan dari dilakukan penelitian ini untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas atas realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kota Surakarta. Data yang digunakan diperoleh dari laporan realisasi anggaran (LRA) tahun 2016-2022, merupakan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode studi Pustaka dan dokumentasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis efektivitas pada Penerimaan PAD dan efisiensi pada belanja daerah berdasarkan rasio efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, belanja daerah belum mencapai tingkat efisiensi yang optimal pada tahun 2016-2022. Tingkat efisiensi yang tidak optimal bisa dilihat dari persentase realisasi belanja daerah berada di bawah 100%, mengindikasikan potensi pemborosan. Laporan realisasi belanja daerah tahun 2016, 2017, 2018, dan 2022 kurang efisien, Namun pada tahun 2019, 2020, dan 2021 ada peningkatan efisiensi. Namun sebaliknya pada pendapatan asli daerah (PAD) selama periode 2016-2022 mayoritas terealisasi dengan efektivitas yang baik. Pada tahun 2016, 2017, 2018, 2020, dan 2021, menunjukkan pencapaian yang baik sesuai dengan anggaran yang direncanakan yang ditunjukkan dari pendapatan asli daerah melebihi atau mendekati 100%,. Namun, pada tahun 2019 dan 2022, terdapat perbedaan di mana efektivitasnya sedikit menurun. Diharapkan Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna untuk meningkatkan pengelolaan anggaran daerah di Kota Surakarta.

**Kata kunci:** Efisiensi, Efektivitas, Belanja daerah, PAD

**Abstract**

The aim of this research was to analyze the efficiency and effectiveness of the realization of the regional income and expenditure budget (APBD) in the City of Surakarta. The data used was obtained from the 2016-2022 budget realization report (LRA), which is secondary data. Data collection uses library study and documentation methods. This type of research is quantitative descriptive research. The data analysis used is the effectiveness method of analyzing PAD revenues and efficiency in regional spending based on effectiveness and efficiency ratios. The results of this research show that regional spending has not yet reached optimal levels of efficiency in 2016-2022. The level of efficiency that is not optimal can be seen from the percentage of regional expenditure realization being below 100%, indicating the potential for waste. Regional expenditure realization reports for 2016, 2017, 2018 and 2022 were less efficient, however in 2019, 2020 and 2021 there was an increase in efficiency. However, on the contrary, most of the Regional Original Income (PAD) during the 2016-2022 period was realized with good effectiveness. In 2016, 2017, 2018, 2020 and 2021, it showed good achievements in accordance with the planned budget as shown by local original revenues exceeding or approaching 100%. However, in 2019 and 2022, there is a difference in effectiveness which has decreased slightly. It is hoped that the results of this

---

research can provide useful input for improving regional budget management in the City of Surakarta.

**Keywords:** Efficiency, Effectiveness, Regional Expenditures, PAD

---

### **Pendahuluan**

Pembentukan otonomi daerah merupakan fokus penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk menumbuhkan inovasi, mendorong persaingan yang sehat antar daerah, dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengelola bagaimana dana APBD digunakan.

APBD adalah rencana anggaran tahunan pemerintah daerah yang dibuat dan disetujui bersama oleh pemerintah provinsi dan DPRD. Hal itu diatur dalam undang-undang daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003. Tahapan awal dalam pengelolaan keuangan daerah adalah rancangan atau tata letak APBD yang dimodifikasi untuk memenuhi kriteria pendapatan daerah dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. APBD dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah agar digunakan dalam mengelola pendapatan dan belanja untuk melaksanakan pembangunan daerah yang efisien untuk mencegah kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan.

Anggaran yang dialokasikan harus digunakan dengan tujuan yang tepat untuk mencapai pengelolaan APBD yang efisien. Efektivitas berkorelasi dengan seberapa sukses suatu tindakan atau kegiatan tertentu. Jika suatu tindakan secara signifikan dapat mempengaruhi kapasitas untuk memberikan layanan masyarakat, bisa dikatakan Tindakan tersebut efektif. Meskipun anggaran telah habis dan telah terealisasi seperti yang diharapkan, hal ini tidak serta merta menunjukkan bahwa anggaran telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud. Akibatnya, pengelolaan anggaran APBD harus dilakukan dengan penekanan pada hasil berbasis kinerja. Pengeluaran APBD harus efisien, artinya harus mengikuti strategi dan berdampak langsung (Badrudin, 2012).

Pengeluaran pemerintah memiliki kualitas yang lebih baik ketika aparat pemerintah efektif dalam melakukan pengeluaran untuk belanja daerah. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan secara efektif dan memiliki pengaruh yang besar bagi Masyarakat utamanya dalam memacu ekspansi ekonomi dan dalam pemberantasan kemiskinan.

Aparat pemerintah harus memberi laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja daerah, semua kegiatan harus diungkapkan dan diinformasikan kepada publik. Orang yang memberikan kepercayaan diperbolehkan dan diharuskan untuk terus bertanggung jawab atas tugas-tugas ini, untuk mencegah kesalahan urusan keuangan dan untuk mendidik masyarakat tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Jadi, informasi yang luas dan disampaikan ke publik dapat menunjukkan tata kelola yang baik, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, dan mendapatkan kepercayaan Masyarakat luas. Kajian berjudul "Analisis Kinerja Belanja Daerah Pada Laporan Realisasi APBD Kota Surakarta" oleh Seli (2021) menjadi landasan penelitian ini. Subjek penelitian ini adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemerintah Kota Surakarta yang membidangi pengelolaan keuangan, termasuk pendapatan dan belanja daerah, BPPKAD Kota Surakarta bertugas menyelidiki bagaimana penggunaan dana tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pemakaian dana untuk pelaksanaan kegiatan belanja daerah.

---

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2018 dan 2019 menunjukkan peningkatan tetapi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2020 menunjukkan penurunan.

Tahun 2018 anggaran belanja sebesar Rp 2.091.964.585.155 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 2.197.454.843.803 sedangkan tahun 2020 sebesar Rp 1.886.698.244.826. Penyebab penurunan ini disebabkan oleh perubahan undang-undang pengelolaan keuangan daerah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Penurunan ini dapat membuka jalan bagi kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) BPPKAD Kota Surakarta pada tahun 2020. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKAD) Kota Surakarta selalu berusaha beradaptasi dengan perubahan keadaan dan perkembangan dalam penyusunan anggaran tanpa mengabaikan pengukuran kinerja belanja karena sejumlah hambatan mengurangi efektivitas sistem penganggaran karena ada kalanya referensi anggaran yang tidak dapat dikelola dalam proses perencanaan anggaran itu sendiri. Latar belakang tersebut, sebagai dasar peneliti melakukan penelitian dengan judul "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus di Kota Surakarta)".

### **Kajian Teori**

#### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian Juwanda, 2021 dengan judul "Analisis Realisasi APBD Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Pemerintah Kota Medan" menunjukkan hasil bahwa pendapatan Pemerintah kota medan 2015-2020 dikatakan cukup efektif kecuali tahun 2016 dinilai kurang efektif. Dalam merealisasikan anggaran belanja dapat dikatakan efektif.

Nurun Nisa, 2021 judul penelitiannya "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tahun 2018-2020" menunjukkan hasil bahwa efektivitas anggaran pendapatan negara dan realisasi penerimaan negara yang tinggi dari tahun 2018 hingga 2020. Dengan demikian, APBN dan realisasi belanjanya dari tahun 2018 hingga 2020 sama-sama cukup efektif.

Christover Lantu, Linda Lambey, Anneke Wangkar, 2017, melakukan penelitian berjudul "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara" Hasil penelitian untuk tingkat efektivitas 2013 berjalan sangat efektif dengan 2014 dan 2015 berjalan efektif. Perbedaan ini disebabkan oleh program-program dan program-program lain yang tidak terealisasi sehingga perlu dijalankan dengan baik. Dari tahun 2013 hingga 2015, efisiensi berada pada kisaran sangat efisien. Siti Mardiyah U, 2017, judul penelitian "Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Medan Tahun Anggaran 2015-2017". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan sangat efektif dan efisien

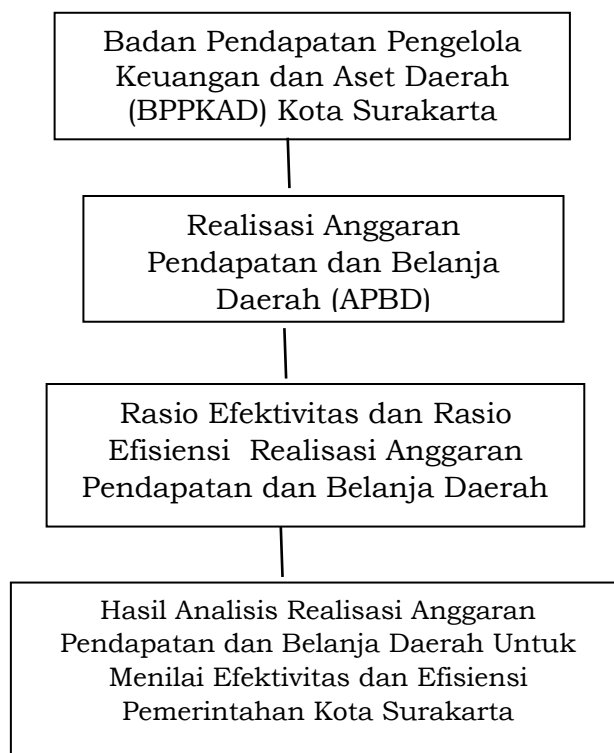
### **Landasan Teori**

#### **a. Efisiensi**

Efisiensi adalah kemampuan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai hasil maksimal. Dalam konteks APBD, efisiensi mengacu pada penggunaan anggaran yang efektif dan optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika suatu tugas diselesaikan secara akurat dan dengan kemampuan terbaik seseorang, itu dikatakan diselesaikan secara efisien (Raharjo, 2011).

- b. Efektivitas  
Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sumber daya manusia (SDM) memberikan hasil yang sesuai dengan harapan terkait dengan kualitas pekerjaan. Dapat dikatakan bahwa suatu tugas dianggap efektif jika dapat diselesaikan dengan benar dalam hal waktu, biaya, dan kualitas seperti yang direncanakan (Masruri, 2014).
- c. Anggaran  
Anggaran berfungsi sebagai cetak biru kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu usaha atau organisasi sesuai dengan rencana pengeluaran, transfer, dan pendapatan pembiayaan yang dikuantifikasi dalam satuan uang dan disusun secara sistematis dalam satu waktu (Safrida Rumondang, 2017).
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  
Menurut (Permendagri, No. 21 Tahun 2011), APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, yang diputuskan berdasarkan peraturan daerah dan dibahas serta disahkan oleh pemerintah provinsi dan DPRD. Alat utama untuk mengimplementasikan kebijakan di pemerintah daerah adalah APBD. Kuantitas pendapatan dan pengeluaran juga ditentukan dengan menggunakan anggaran terbatas. Selain membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, dan menyetujui pengeluaran di masa depan.
- e. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  
Laporan realisasi anggaran yang membandingkan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dijelaskan dalam (Permendagri, 2013) No. 64 sebagai ringkasan sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat/daerah.

## Kerangka Pemikiran



**Gambar 1. Kerangka pemikiran**

## Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menjelaskan fenomena yang ada dengan angka-angka untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan yang diteliti, jadi merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder. Jenis data yang digunakan ada dua, yaitu:

a. Data kualitatif: data yang bersifat deskriptif/uraian dan tidak dapat diukur menggunakan skala numerik.

b. Data kuantitatif: data yang berbentuk angka numerik atau skala.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sehingga dapat mengungkap peristiwa dan fakta, sesuai dengan judul penelitian, yakni “Analisis Efektivitas, dan Efisiensi pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”

### 2. Metode Analisis Data

#### a. Analisis Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output).

Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria analisis rasio efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) anggaran belanja dianggap tidak efisien jika hasil >100%
- 2) anggaran belanja dianggap kurang efisien jika hasil 90% - 100%
- 3) anggaran belanja dianggap cukup efisien jika hasil 80% - 90%
- 4) anggaran belanja dianggap efisien jika hasil 60% - 80%
- 5) anggaran belanja dianggap sangat efisien jika hasil <60%

#### b. Analisis Efektivitas

Kinerja di sektor publik dinilai efektif jika rasionya antara 90,01% sampai 100%; rasio efektivitas yang lebih besar menunjukkan kinerja yang lebih baik, sedangkan rasio yang lebih rendah menunjukkan kinerja yang lebih rendah (Yunianti, 2015). Dengan membandingkan antara realisasi dengan anggaran Penerimaan PAD maka diperoleh rumus tingkat efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan uang (PAD) dengan cara yang ditentukan. Semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan uang, maka nilai efektivitas PAD semakin besar.

Berikut ini adalah kriteria nilai efektivitas PAD:

- 6) PAD dianggap sangat efektif bila rasio efektivitasnya >100%
- 7) PAD dianggap efektif bila rasio efektivitasnya 90% - 100%,
- 8) PAD dianggap cukup efektif bila rasio efektivitasnya 80% - 90%,
- 9) PAD dianggap kurang efektif bila rasio efektivitasnya 60% - 80
- 10) PAD dianggap tidak efektif bila rasio efektivitasnya < 60%

**Hasil dan Pembahasan**

## 1. Analisis Efektivitas

**Tabel 1: Perhitungan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran PAD Tahun 2017-2022 (Dalam Ribuan)**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Analisis Efektivitas
2016	482.403.909	537.422.335	111,41%	Sangat efektif
2017	492.503.909	527.544.224	107,11%	Sangat Efektif
2018	505.328.290	525.125.553	103,91%	Sangat Efektif
2019	567.757.960	546.020.005	96,17%	Efektif
2020	402.870.481	477.466.583	118,51%	Sangat Efektif
2021	514.200.704	557.448.877	108,41%	Sangat Efektif
2022	740.143.061	647.440.583	87,47%	Cukup Efektif

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD lebih dari 100%, yang terjadi pada tahun 2016, 2017, 2018, 2020 dan 2021. Pada tahun-tahun tersebut realisasi penerimaan PAD lebih besar dari yang ditargetkan/dianggarkan. Dengan kata lain rasio penerimaan PAD di tahun-tahun tersebut sangat efektif sebab rasionya lebih dari 100%. Pada tahun 2019 penerimaan PAD dikategorikan efektif dengan rasio sebesar 96,17%. Dikatakan efektif bila rasionya antara 90% sampai 100%. Walaupun realisasi penerimaan PAD di bawah target yang telah dianggarkannya tapi efektivitasnya dinilai baik. Dan pada tahun 2022 rasio efektivitasnya masuk dalam katagori sebagai cukup efektif (87,47%), dengan persentase di antara 80% hingga 90%, walaupun realisasi penerimaan PAD lebih rendah dari target yg telah ditetapkan (kurang dari 100%) namun masih menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik. Setelah dihitung rasio efektivitas penerimaan PAD, selanjutnya dilakukan perhitungan kenaikan/penurunan tingkat efektivitas pada setiap tahun serta besarnya penyimpangan.

## a. Perhitungan Persentase Penyimpangan Anggaran PAD dengan Realisasinya dari Tahun 2017-2022:

Untuk menghitung persentase penyimpangan anggaran PAD dengan realisasinya maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyimpangan} = \frac{\text{Realisasi} - \text{Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

**Tabel 2: Perhitungan Persentase Penyimpangan Realisasi Dengan Anggaran Penerimaan PAD tahun 2017-2022 (Dalam Ribuan)**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Penyimpangan (%)
2016	482.403.909	537.422.335	11,41%
2017	492.503.909	527.544.224	7,11%
2018	505.328.290	525.125.553	3,91%
2019	567.757.960	546.020.005	(3,83%)
2020	402.870.481	477.466.583	18,51%
2021	514.200.704	557.448.877	8,41%
2022	740.143.061	647.440.583	(12,53%)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2016,2017,2018,2020 dan 2021 terjadi penyimpangan dengan nilai positif yang berarti realisasi penerimaan PAD lebih tinggi dari yang dianggarkan, sebaliknya pada tahun 2019 dan 2022 terjadi penyimpangan dengan nilai negatif yang berarti realisasi penerimaan PAD lebih rendah dari target yang telah dianggarkan.

b. Kenaikan/Penurunan Tingkat Efektivitas Penerimaan PAD pada Setiap Tahun

Untuk menghitung kenaikan/penurunan tingkat efektivitas penerimaan PAD, maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kenaikan/Penurunan} = \frac{\sum n - \sum n-1}{\sum n-1} \times 100\%$$

**Tabel 3: Perhitungan Kenaikan/Penurunan Tingkat Efektivitas Penerimaan PAD pada Tahun 2017-2022**

Tahun	Tingkat Efektivitas (%)	Kenaikan atau Penurunan Tingkat Efektivitas (%)	
2016	111,41%	0	-
2017	107,11%	(3,86%)	Turun
2018	103,91%	(2,98%)	Turun
2019	96,17%	(7.45%)	Turun
2020	118,51%	23.21%	Naik
2021	108,41%	(8.52%)	Turun
2022	87,47%	(19.32%)	Turun

Berdasarkan tabel di atas dilihat efektivitas penerimaan PAD dari tahun 2017 ke tahun 2018 turun 2,98% dan tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan 7,45%. Sedangkan efektifitas penerimaan PAD dari tahun 2019 ke tahun 2020 naik 23,21%. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 8,52%, demikian pula tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan pula yaitu sebesar 19,32%.

2. Analisis Efisiensi

**Tabel 4: Perhitungan Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2017-2022 (Dalam Ribuan)**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentasi (%)	Analisis Efisiensi
2016	1.782.479.900	1.712.188.566	96,06%	Kurang Efisien
2017	1.767.486.059	1.724.347.315	97,55%	Kurang Efisien
2018	2.090.933.682	1.913.787.491	91,52%	Kurang Efisien
2019	2.175.468.858	1.993.022.516	91,61%	Kurang Efisien
2020	1.792.379.905	1.612.189.469	89,94%	Cukup Efisien
2021	2.184.958.890	1.866.496.344	85,42%	Cukup Efisien
2022	2.459.474.822	2.087.823.392	84,88%	Cukup Efisien

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rasio efisiennya berkisar 90% hingga 100% terjadi pada tahun 2016,2017,2018 dan 2019. Rasio efisiensi

realisasi anggaran belanja daerah ini dapat dikategorikan sebagai kurang efisien. Rasio efisiensi realisasi anggaran belanja daerah tahun 2020, 2021 dan 2022 berkisar 80% hingga 90%. Rasio sebesar ini dikategorikan sebagai cukup efisien. Semakin kecil angka rasio ini berarti semakin efisien realisasi belanja daerah.

Selanjutnya dilakukan perhitungan besarnya kenaikan/penurunan tingkat efisiensi pada setiap tahun dan persentase penyimpangannya.

- a. Perhitungan Persentase Penyimpangan Anggaran Belanja Daerah dengan Realisasinya dari Tahun 2016-2022:

Rumus menghitung persentase penyimpangan anggaran belanja daerah dengan realisasinya sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyimpangan} = \frac{\text{Realisasi} - \text{Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

**Tabel 5: Perhitungan Persentase Penyimpangan Realisasi Dengan Anggaran Belanja Daerah tahun 2017-2022**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Penyimpangan (%)
2016	1.782.479.900	1.712.188.566	(3,94%)
2017	1.767.486.059	1.724.347.315	(2,45%)
2018	2.090.933.682	1.913.787.491	(8,48%)
2019	2.175.468.858	1.993.022.516	(8,39%)
2020	1.792.379.905	1.612.189.469	(10,06%)
2021	2.184.958.890	1.866.496.344	(14,58%)
2022	2.459.474.822	2.087.823.392	(15,11%)

Berdasarkan tabel di atas nilai penyimpangan anggaran dengan realisasi belanja daerah menunjukkan angka negatif dari tahun 2016 sampai 2022 yang berarti realisasi belanja daerah lebih kecil dari yang dianggarkan.

- b. Kenaikan/Penurunan Tingkat Efisiensi Belanja Daerah pada Setiap Tahun  
Rumus kenaikan/penurunan tingkat efisiensi belanja daerah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kenaikan/Penurunan} = \frac{\sum_n - \sum_{n-1}}{\sum_{n-1}} \times 100\%$$

**Tabel 6: Perhitungan Kenaikan/Penurunan Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2017-2022**

Tahun	Tingkat Efisiensi (%)	Kenaikan atau Penurunan Tingkat Efisiensi (%)	
2016	96,06%	0	-
2017	97,55%	1,55%	Naik
2018	91,52%	(6,18%)	Turun
2019	91,61%	0,10%	Turun
2020	89,94%	(1,82%)	Naik
2021	85,42%	(5,03%)	Turun
2022	84,88%	(0,63%)	Turun

Berdasarkan tabel di atas tingkat efisiensi belanja daerah dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan, dari tahun 2017 ke 2018 dan dari 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Sedangkan efisiensi belanja daerah dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan, pada tahun 2020 ke 2021 dan



tahun 2021 ke tahun 2022 kembali mengalami penurunan.

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditarik beberapa kesimpulan hasil analisis efektivitas dan efisiensi laporan realisasi anggaran tahun 2017-2022

##### 1. Efektivitas Realisasi Penerimaan PAD:

Pada tahun 2016, 2017, 2018, 2020 dan 2021 realisasi penerimaan PAD lebih dari 100%. Dengan kata lain rasio penerimaan PAD di tahun-tahun tersebut sangat efektif dan realisasi penerimaan PAD jauh lebih besar dari yang ditargetkan/dianggarkan. Pada tahun 2019 rasio efektivitasnya sebesar 96,17% jadi rasionya antara 90% sampai 100% dikategorikan efektif walaupun realisasi penerimaan PAD di bawah target yang telah dianggarkan tapi efektivitasnya dinilai baik. tahun 2022 rasio efektivitasnya masuk dalam kategori sebagai cukup efektif (87,47%), dengan persentase di antara 80% hingga 90%, walaupun realisasi penerimaan PAD lebih rendah dari target yg telah ditetapkan (kurang dari 100%) namun masih menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik.

##### 2. Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran:

Pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 rasio efisiennya berkisar 90% hingga 100%. Rasio efisiensi realisasi anggaran belanja daerah ini dapat dikategorikan sebagai kurang efisien. Rasio efisiensi realisasi anggaran belanja daerah tahun 2020, 2021 dan 2022 berkisar 80% hingga 90%. Rasio sebesar ini dikategorikan sebagai cukup efisien. Semakin kecil rasio ini menunjukkan semakin efisien realisasi belanja daerah.

#### **Saran**

Di masa mendatang agar pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi laporan realisasi anggaran. Evaluasi dilakukan menyeluruh meliputi pengalokasian sumber daya yang tepat, pengendalian biaya, serta peningkatan pengelolaan keuangan secara menyeluruh. Pentingnya penyusunan perencanaan anggaran secara komprehensif dengan mempertimbangkan tujuan yang jelas dan realistis. Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran secara berkala dan berkelanjutan

#### **Referensi**

<https://www.facebook.com/gamalthabroni>. Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik Sampling & Langkah - serupa.id. serupa.id. Published February 16, 2021. Accessed November 13, 2022. <https://serupa.id/populasi-dan-sampel-penelitian-serta-teknik-sampling/>

Juwanda. (2021). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Efektivitas Dan. *Repository.Umsu.Ac.Id*. [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/16089/1/SKRIPSI\\_JUWANDA.pdf](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/16089/1/SKRIPSI_JUWANDA.pdf)

Pengaruh Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada BPPKAD Kota Surakarta. Memopos.com. Published January 2022. Accessed November 13, 2022. <https://www.memopos.com/2022/01/pengaruh-kinerja-anggaran-pendapatan.html>

- Rusdan, A. (2020). Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2019.
- Seli Fatmahwati. (2016). Analisis kinerja belanja Daerah dalam laporan realisasi Anggaran pada BPPKAD Kota Surakarta (2018 – 2020 ). (2018 – 2020 ) Disusun, 3, 103–111.
- Sri Rahayu. (2019). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas PAD Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
- Sri Kurnia. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode Value For Money pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang*. 103. <https://text-id.123dok.com/document/ydxvpnlz-analisis-kinerja-keuangan-dengan-menggunakan-metode-value-for-money-pada-badan-pengelola-keuangan-dan-aset-daerah-kota-palembang-skripsi.html>
- S, H. (2021). *Analisis Anggaran dan Realisasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang*. 85. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13305-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13305-Full_Text.pdf)